KENDALA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI INDONESIA

Muhammad Akmal Agustira dan Rizki Amelia

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit rakyat memegang peranan penting dalam mendorong industri kelapa sawit nasional, ditandai dengan luasan lahannya yang mencapai 41% dari total luas areal kelapa sawit di Indonesia. Namun, peranan perkebunan kelapa sawit rakyat belum optimal terutama mengenai rendahnya produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya produktivitas perkebunan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi perkebunan rakyat untuk mencapai produktivitas yang optimal terdiri dari berbagai faktor, diantaranya bahan tanaman, kesesuaian lahan yang dipaksakan, pelaksanaan kultur teknis yang tidak tepat, faktor pemasaran, lemahnya kelembagaan di tingkat pekebun, perilaku pekebun, hubungan kemitraan, kurangnya pembinaan, penyuluhan, dan pemberdayaan serta terhambatnya pelaksanaan replanting. Perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder perkebunan kelapa sawit baik pemerintah, perusahaan perkebunan, lembaga keuangan, lembaga/organisasi kelompok maupun pekebun rakyat untuk meningkatkan potensi kelapa sawit yang lebih optimal.

Kata kunci *: perkebunan rakyat, kelapa sawit, produktivitas.*

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkebunan di Indonesia, perkebunan rakyat kelapa sawit baru muncul belakangan dibanding perkebunan rakyat komoditas lain seperti karet, lada, dan kopi (Koenjoroningrat,1997). Pada awalnya kelapa sawit hanya diusahakan oleh perkebunan besar baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Salah satu penyebabnya adalah membangun perkebunan kelapa sawit membutuhkan modal yang cukup besar yang hanya bisa dilakukan perusahaan.

Cikal bakal perkebunan rakyat dimulai pada tahun 1977 dimana dibentuk Pola Inti Plasma (PIR). Pola PIR ini berkembang dalam dalam berbagai pola meliputi PIR-Lokal, PIR-khusus, PIR-Trans yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri maupun dananya dari pemerintah melalui Departemen Pertanian. Konsepsi pola PIR tersebut merupakan pengembangan perkebunan rakyat dimana perkebunan besar sebagai inti, yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam satu sistem kemitraan yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan (Badrun, 2010).

Konsepsi PIR terus berkembang dengan mengintegrasikan struktur usaha perkebunan dengan perkebunan rakyat dalam bentuk kemitraan dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR-BUN). PIR-BUN memperoleh pendanaan dari dana likuiditas bank Indonesia yang berlabel Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA) (Anwar and Herwani, 2010).

Seiring dengan perkembangan waktu, selain dikembangkan sistem kemitraan dengan perusahaan, rakyat di sekitar perkebunan besar pun mulai dapat belajar menanam kelapa sawit secara swadaya dan mendorong berkembangnya perkebunan rakyat di Indonesia hingga mencapai 3,6 juta ha atau 41% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 8,9 juta ha. Hal ini menunjukan perkebunan rakyat memegang peranan penting terhadap industri kelapa sawit di Indonesia

Namun, peranan perkebunan kelapa sawit tersebut masih belum optimal. Rendahnya produktivitas menjadi permasalahan utama pada perkebunan rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kendala yang dihadapi perkebunan rakyat dalam mencapai peningkatan produktivitas.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam bentuk kualitatif dari fenomena sosial ekonomi yang aktual dengan analisis kuantitatif sebagai supplemen didasarkan pada pengembangan yang bersama dari teori dan pengamatan (Mantra,2004). Lokasi penelitian dilakukan di sentra perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau,

Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dimana responden telah ditentukan untuk dimintai keterangan oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa calon responden mengetahui objek penelitian.

Data yang dikumpulkan adalah data sosial ekonomi pekebun, sumber permodalan, pola usahatani, praktek budidaya, pasar dan informasi kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui metode survey dengan wawancara mendalam (*indept interview)* dilengkapi dengan lembar kuesioner.

III. Gambaran Umum Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Tahun 1980-an merupakan awal berkembangnya perkebunan kelapa sawit rakyat. Pemerintah melalui PBN dan PBS kemudian mengembangkan perkebunan sawit dengan Pola PIR Lokal, PIR Khusus, dan PIR Trans. Proyek PIR Lokal kemudian digantikan dengan pola Kredit Koperasi Primer untuk Para Anggotanya (KKPA) yang dimulai sejak tahun 1996, dilanjutkan program revitalisasi pada tahun 2005 dan berbagai pola kemitraan yang dikembangkan oleh perusahaan perkebunan lainnya seperti pola Perkebunan Kelapa Sawit rakyat (KKSR) dan plasma mandiri. Disamping pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan terdapat pula perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara swadaya yang turut mendorong pesat perkembangnya kelapa sawit rakyat. Pada awal perkembangnya 1977 hingga 1980 luas perkebunan kelapa sawit rakyat baru mencapai 6.175 ha. Pada tahun 1990-an Seiring dengan berkembangnya perusahaan perkebunan swasta yang membentuk pola inti plasma, turut mendorong perkebunan rakyat hingga pada tahun 1999 perkebunan rakyat mencapai angka 1 juta ha. Dengan semakin meningkatnya prospek minyak sawit, perkebunan kelapa sawit berkembang pesat secara kemitraan maupun swadaya, sehingga dalam waktu 6 tahun (2004) luas perkebunan kelapa sawit rakyat mencapai 2 juta ha dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 18,9%. Perkebunan kelapa sawit rakyat pun terus berkembang dengan pesat seiring dengan terus meningkatnya harga minyak sawit pada tahun 2006 hingga 2008, sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat pada tahun 2009 mencapai angka 3 juta ha (Gambar 1). Menurut Ditjenbun (2012) perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 3,6 juta ha atau 41% dari total perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia yang mencapai 8,9 juta.ha (Gambar 2)

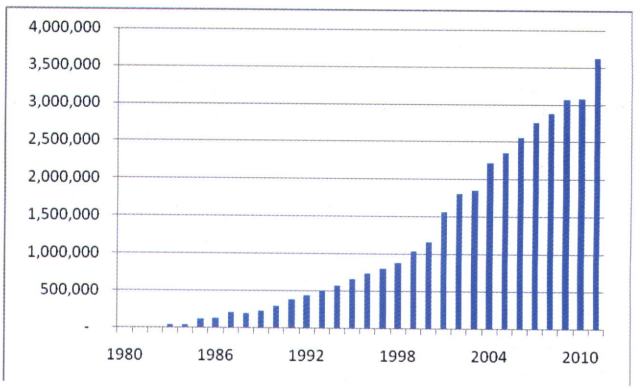

Gambar 1. Perkebangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia

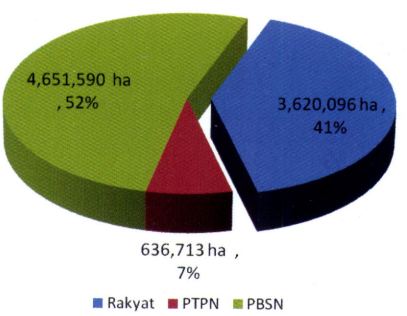

Gambar 2. Komposisi Kepemilikan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Sumber : Ditjenbun, 2012

Luasan tersebut akan terus bertambah mengingat animo masyarakat yang tinggi terhadap perkebunan kelapa sawit dan di dukung kebijakan pemerintah melalui penerapan Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 mengenai kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit untuk menyediakan minimal 20% dari total areal perkebunannya untuk pembangunan kebun plasma.

Peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas. Produktivitas perkebunan rakyat di

Indonesia merupakan yang terendah bila dibandingkan dengan perkebunan negara dan swasta. Produktivitas minyak sawit Indonesia dari perkebunan rakyat pada tahun 2011 sebesar 3,37 ton CPO/ha jauh lebih rendah dari potensi produksi kelapa sawit yang mencapai 8-9 ton CPO/ha (Lubis,2004). Jika diasumsikan rata-rata rendemen minyak sawit nasional sebesar 20%, maka produktivitas kebun kelapa sawit rakyat rata-rata pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 16,8 ton TBS/ha/tahun. Pada kenyataannya, rendemen minyak sawit untuk perkebunan rakyat banyak yang tidak mencapai 20%. Perkembangan luas areal dan produktivitas perkebunan kelapa sawiit rakyat dapat dilihat pada Gambar 3.

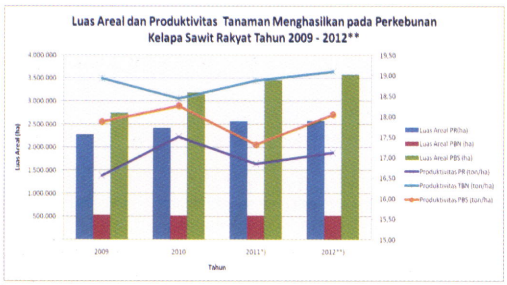

Gambar 3. Perkembangan luas areal dan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Sumber : Ditjenbun, 2012 (diolah)

*) angka sementara

**)angka estimasi

II. KENDALA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

Besar proporsi luas perkebunan rakyat yang mencapai 41% dari luas perkebunan kelapa sawit Indonesia menunjukan peranan kelapa sawit memegang peranan penting terhadap industri kelapa sawit. Masih rendahnya produktivitas sawit rakyat yang sebesar 3,37 ton CPO/ha atau 16,8 ton/ha ((asumsi rendemen 20%) masih jauh dari potensi produksi optimalnya sesuai dengan visi pemerintah 35 : 26 (35 TBS/ha 26% persen). Berbagai kendala yang dihadapi perkebunan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Bahan Tanaman.

Bahan tanaman merupakan faktor penting bagi produksi kelapa sawit. Walaupun nilai bahan tanaman hanya 3% dari faktor produksi, akan tetapi memberi dampak yang besar dalam ±25 tahun ke depan. Berdasarkan temuan di sentra perkebunan rakyat di beberapa provinsi sampel (Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan barat, dan Kalimantan Timur) menunjukan 60% bahan tanaman yang digunakan oleh perkebunan rakyat di Indonesia bersumber dari bahan tanaman ilegitim dan 90% nya merupakan petani swadaya. Penggunaan bahan tanaman yang rendah kualitasnya tersebut berdampak pada produksi yang tidak optimal. Potensi produksi tanaman dengan bibit asalan hanya sebesar 10 – 12 ton TBS/ha/tahun (Lubis, 2004), dengan potensi rendemen minyak rendah (16%). Akibatnya, kebun tidak dapat menopang kehidupan petani karena produktivitas rendah dan pengembalian kredit terhambat. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pabrik, dimana PKS bekerja dibawah kapasitas sehingga biaya olah tinggi. Perbandingan produktivitas TBS antara bahan tanaman resmi dengan bahan tanaman ilegitim dapat dilihat pada Gambar 4.

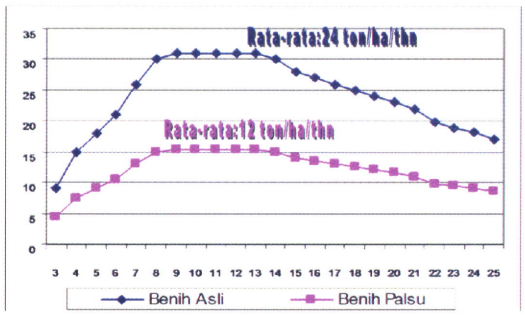

Gambar 4. Perbandingan Produktivitas Antara Benih Asli dengan Benih Ilegitim

Maraknya bahan tanaman palsu di kalangan perkebunan rakyat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya : kurangnya informasi mengenai pentingnya penggunaan bahan tanaman unggul kepada pekebun, jauhnya sumber benih dengan lokasi perkebunan masyarakat, harga bahan tanaman ilegitim yang lebih rendah, propaganda pemalsu bahan tanaman kelapa sawit, serta timbulnya kesan bahwa adanya kesulitan dalam persyaratan

administrasi pembelian kecambah langsung dari produsen benih.

2. *Kesesuain Lahan yang Dipaksakan.*

Dengan dampak perkebunan kelapa sawit yang dirasakan oleh masyarakat, pemanfaatannya bagi industri yang sangat luas, dan prospek kelapa sawit yang sangat baik maka animo masyarakat untuk berkebun kelapa sawit juga semakin tinggi. Hal ini menimbulkan fenomena demam sawit di kalangan masyarakat. Fenomena tersebut menyebabkan pembangunan kebun tidak memperhatikan kesesuaian lahan, termasuk konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa pengolahan lahan yang sesuai, akibatnya produksi tanaman rendah. Selain itu, beberapa kebun rakyat menerapkan tumpang sari antara kelapa sawit dengan tanaman tahunan lainnya, seperti karet dan kakao yang menyebabkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak optimal. Seringkali petani tidak memperhatikan jarak kebun ke PKS, akibatnya biaya angkut TBS terlalu tinggi.

3. *Kultur Teknis yang tidak tepat*

Beberapa penyebab penerapan kultur teknis yang tidak tepat pada perkebunan rakyat diantaranya :

- Konservasi lahan dan air yang tidak diperhatikan , tidak adanya pemeliharaan tapak kuda, tapak timbun, parit/ drainase, serta pembangunan teras kotur yang tidak sesuai
- Pemupukan yang tidak seimbang (tidak menerapkan 4T : Tepat Jenis, Tepat Cara, Tepat Dosis, dan Tepat Waktu), disebabkan :
  - Minimnya pengetahuan pekebun terhadap dosis,cara, waktu,maupun jenisnya
  - Daya beli rendah, dikarenakan : produksi TBS masih rendah, lahan yang diusahakan terbatas, serta kurangnya manajemen keuangan usahatani
  - Perbedaan harga antara pupuk subsisdi dan non subsidi yang cukup besar
  - Kualitas pupuk rendah karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pupuk yang berkualitas
  - Peredaran pupuk palsu dengan kandungan hara yang jauh di bawah dosis standar.
  - Beredarnya berbagai pupuk majemuk yang menjanjikan kenaikan produksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pengendalian Gulma, yaitu pelaksanaan *clean weeding* yang mengakibatkan pupuk tidak terserap dengan baik dan hilangnya inang bagi predator hama kelapa sawit sehingga biaya pengendalian hama tinggi, kurangnya perawatan piringan/gawangan, lebar dan kondisi piringan tidak standar.
- Pekebun tidak menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) dan lebih mengandalkan bahan kimia. Selain itu lemahnya *Early Warning System* (EWS) terhadap serangan hama dan penyakit juga menjadi kendala dalam perkebunan rakyat
- Penunasan yang kurang, bahkan berlebihan.
- Tidak adanya kastrasi, sehingga pertumbuhan vegetatif tanaman tidak optimal
- Tidak adanya konsolidasi pada tanaman rusak/abnormal.
- Kendala dalam hal panen, yaitu tidak memperhatikan kriteria kematangan (buah mentah sudah dipanen, maupun buah busuk dikarenakan terlambat panen) yang berpengaruh terhadap rendemen.

4. *Pemasaran.*

Kendala dalam pemasaran yang berpengaruh terhadap produksi TBS pekebun rakyat yaitu pengaruh tengkulak dan PKS tanpa kebun. Adanya tengkulak dan PKS tanpa kebun yang menawarkan harga lebih tinggi dari harga PKS resmi atau PKS inti menyebabkan petani tidak menjual ke perusahaan mitra (Dja'far dkk,2007). Hal tersebut berdampak pada hubungan kemitraan antara perusahaan inti dan plasma. Bagi perusahaan inti, berkurangnya *supply* TBS dari kebun plasma dapat menyebankan *idle capacity*. Bagi kebun plasma, penjualan hasil TBS atau tengkulak menyebabkan produksi TBS petani tidak terdata. Selain itu, perusahaan dapat mengurangi pembinaan pada kebun plasma yang tidak lagi menjual hasil panennya ke PKS inti, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya bantuan yang dapat diterima pekebun plasma dalam operasional kebunnya, seperti pembinaan, subsidi pupuk, replanting dan sebagainya.

5. *Lemahnya kelembagaan petani.*

Kelembagaan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Tiap-tiap kelembagaan mempunyai tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat didalamnya memiliki norma dan perilaku tertentu yang sifatnya khas (Syahyuti, 2006). Dalam hal ini, kelompok tani sebagai salah satu bentuk kelembagaan merupakan sejumlah petani yang mempunyai kaitan antar hubungan yang satu dengan yang lainnya atas dasar keserasian dan kebutuhan yang sama, terikat secara informal dalam satu wadah kelompok, dan mempunyai aktifitas sama dalam hal tani, umpamanya dalam hal kebun dan pemeliharaan ternak (Hasan, 2009).

Kelompok tani sebagai lembaga terkecil pada lingkup perkebunan rakyat dapat berperan dalam pemberdayaan pekebun rakyat, sebagai sumber pertukaran informasi, peningkatan keterampilan pekebun, sebagai unit produksi (merencanakan dan menentukan pola usaha yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, pemasaran, sarana produksi, dan sumberdaya alam) , menyusun rencana usaha seperti: Rencana Definitif Kelompok (RDK), dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), termasuk rencana permodalan, dan sebagai wahana kerjasama.

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian pada lokasi perkebunan rakyat di beberapa provinsi sampel, tidak jarang ditemui kelompok tani yang tidak aktif dan hanya sebagai sarana penyalur bantuan atau subsidi dari pemerintah dan perusahaan kepada pekebun rakyat. Kelompok tani yang tidak aktif tersebut didorong karena beberapa faktor, diantaranya kemampuan manajemen dan usaha anggota kelompok tani yang lemah, faktor sumberdaya manusia (kurangnya pengetahuan tentang organisasi yang baik, kebergantungan terhadap tokoh masyarakat), serta jaringan kerjasama anggota melemah (tidak ada kegiatan bersama, pemecahan masalah secara individu, serta kepercayaan anggota ke pengurus atau sesama pekebun yang semakin lemah). Dengan tidak aktifnya kelompok tani, permasalahan teknis dalam berkebun yang seharusnya dapat diselesaikan secara bersama, menjadi penyelesaian secara individu dengan keterbatasan sumberdaya petani tersebut.

6. *Perilaku Pekebun Rakyat.*

Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat tidak lepas dari karakteristik usahatani kecil. Karakteristik usahatani kecil adalah sebagai berikut(Mawardi, 2012) :

- Volume penjualan, jumlah pekerja, dan keuntungan kotor relatif kecil;
- Modal usaha biasanya berasal dari perorangan, kelompok kecil, dan rumah tangga;
- Pengelolaan usaha kuranng berorientasi pada pengembangan usaha
- Penguasaan IPTEK dan inovasi baru kurang
- Posisi tawar dan persaingan rendah
- Pemilik sering merangkap sebagai pekerja dalam berusaha
- Wilayah operasi dan *networking* sangat terbatas

Karakteristik usaha tani tersebut didorong atas perilaku pekebun kelapa sawit rakyat yang masih cenderung dengan pola pikir subsisten dibandingkan komersial. Tantangan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat segi perilaku petani dapat dilihat dari:

- Perubahan lapangan usaha ekstraktif , yaitu usaha produksi yang menggali dan mengumpulkan barang-barang yang disediakan alam (seperti pertambangan, penebangan kayu) menjadi lapangan usaha budidaya yang memerlukan pengolahan lahan, pemeliharaan, dan tidak berpindah-pindah.
- Keuntungan yang cukup besar yang didapat oleh pekebun kelapa sawit rakyat dari hasil pertaniannya telah mendorong budaya konsumtif di tingkat petani. Hasil panen yang diperoleh diutamakan untuk kepentingan rumah tangga maupun perluasan kebun daripada disisihkan untuk pembelian sarana produksi (seperti bibit, pupuk, obat-obatan) dan penyisihan dana *replanting*. Kurangnya manajemen keuangan usahatani tersebut yang berdampak pada saat musim *track* dimana panen menurun atau pada saat harga TBS jatuh. Dengan pendapatan menurun, petani harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar tunggakan kredit, akibatnya alokasi dana untuk pembelian sarana produksi semakin berkurang. Dengan kekurangan

dalam kultur teknis. Pelatihan terpadu tidak hanya masalah kultur teknis, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu lainnya seperti ilmu komunikasi, pemberdayaan kelompok, manajemen kelompok agar penyuluh tidak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi kemampuan sosial dan manajemen dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelompok.

3. Regulasi dalam Pemasaran dan hubungan kemitraan

Salah satu kendala dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini adalah rusaknya hubungan kemitraan yang sebelum terjalin dengan baik antara perusahaan perkebunan inti dengan plasma. Penyebabnya utamanya di daerah sampel adalah maraknya keberadaaan Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun (PKSTK). Disatu sisi PKSTK memberikan dampak positif bagi pengembangan perkebunan rakyat dengan mengurangi persaingan pasar TBS di tingkat pekebun (Dja'far, 2007). Namun PKSTK yang berada di sekitar perkebunan kemitraan (PIR, KKPA, Revitalisasi, KKSR) akan berdampak negatif terhadap hubungan kemitraan. Masuknya pelaku lain di luar sistem produk seperti PKSTK dan pedagang pengumpul akan merusak hubungan kemitraan (Zuhri, 2008). Penawaran harga yang cendrung lebih tinggi daripada PKS mitra menyebabkan pekebun sawit rakyat mengalihkan penjualan TBS ke PKSTK sehingga menganggu kontuinitas PKS mitra, terhambatnya pelunasan kredit hingga konflik sosial sehingga untuk hubungan jangka panjang perusahaan perkebunan enggan bermitra dengan pekebun rakyat (anonim, 2008). Untuk itu, perlu dibuat dan diterapkan regulasi mengenai zonanisasi PKS dan regulasi mengenai hubungan kemitraan untuk memperbaiki hubungan kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat.

4. Meningkatkan Peran Perbankan

Perbankan memiliki peran dalam perekonomian di masyarakat, termasuk juga pada sub sektor perkebunan kelapa sawit rakyat. Peran perbankan dapat ditingkatkan melalui penyedian skim kredit murah bagi pengembangan dan *replanting* perkebunan kelapa sawit rakyat yang mekanisme pembayarannya disesuakan dengan hasil panen TBS diperoleh pekebun rakyat. Disamping itu, pihak perbankan dapat menyediakan produk tabungan jangka panjang bagi pendanaan *replanting* bagi perkebunan rakyat. Dengan demikian permasalahan keterbatasan modal dalam pengembangan dan *replanting* ke depannya dapat teratasi melalui peningkatan peran perbankan dalam penyediaan dana kredit dan pengumpulan dana dari pekebun rakyat.

5. Melibatkan perusahaan Perkebunan melakukan pembinaan perkebunan rakyat dalam program CSR

Dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 40 dinyatakan bahwa setiap perusahaan di Indonesia harus melaksanakan Program *Cooperate Social Responsbility* (CSR), termasuk juga perusahaan perkebunan. Dana CSR perusahaan perkebunan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pengembangan perkebunan rakyat seperti kegiatan penyuluhan kultur teknis, pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani kepada pekebun kelapa sawit rakyat yang berada disekitar kebun perusahaan, pemberian bantuan bibit unggul, serta pembangunan infrastruktur kebun rakyat. Dengan demikian dana CSR perusahaan perkebunan dapat berdampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat dibandingkan hanya sebatas bantuan sosial kepada masyarakat.

6. Pengembalian Dana Bea Keluar untuk Pengembangan perkebunan rakyat

Minyak sawit sebagai komoditi ekspor strategis dikenakan Bea Keluar (BK) oleh pemerintah. Kontribusi BK minyak sawit telah menghasil US$ 31 milyar terhadap pendapatan negara sejak diterapkan bea keluar minyak sawit tahun 2010 (Arshad, 2012). Namun dari dana tersebut, tidak ada diperuntukan bagi industri kelapa sawit termasuk perkebunan rakyat. Dana BK seharusnya dapat dikembalikan kepada pekebun kelapa sawit rakyat dalam bentuk berbagai program seperti perbaikan infrastruktur jalan, mempermudah akses pekebun rakyat terhadap input produksi (bibit unggul dan pupuk), pemberdayaan pekebun rakyat, mempekokoh kelembagaan pekebun rakyat seperti KUD dan Kelompok petani, mempermudah akses kredit murah bagi investasi dan *replanting*, mempermudah akses pasar, serta memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan kelapa sawit. Untuk itu, pengembalian dana BK kelapa sawit bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan langkah yang tepat untuk

mengatasi kendala dalam peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

Pesatnya perkebunan kelapa sawit rakyat dalam beberapa tahun terakhir tidak diikuti peningkatan produktivitas. Kendala yang dihadapi, tidak hanya dalam hal bahan tanaman dan kultur teknis, tetapi juga menghadapi kendala sosial ekonomi, perilaku petani dan keterkaitannya dengan fenomena demam sawit di kalangan pekebun rakyat. Perlu adanya dukungan dari seluruh *stakeholder* perkebunan kelapa sawit baik pemerintah, perusahaan perkebunan, lembaga keuangan, lembaga/organisasi kelompok maupun pekebun rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Agustira, M.A., Kurniawan A., Dja'far, Siahaan, D., Wahyono. T., 2008. Tinjauan Ekonomi Industri Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan

Anonim, 2008. Evaluasi Kebijakan Perkebunan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jakarta

Anwar M and Herwany,2011. Strategic Alliance between Nucleus-Plasma In Small Medium Entriprise in Indonesia. 3rd Ubaya International Annual Symposium on Managemen. Global Bussiness Networking, Oppurtunities to be World Class Enterprise 15-16 March 2006 Bandung

Arshad. A., 2012. Kebijakan Pemerintah Miskinkan Petani. Seminar Nasional Perkebunan Rakyat Sebagai Pendukung Perekonomian. Jakarta 26 Januari 2012

Badrun, M. 2010. *Tonggak Perubahan : Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri.* Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan

Dja'far, M.Akmal.A., Ratnawati N, 2007, Polemik Keberadaan PKSTK dalam Industri Kelapa Sawit Indonesia. Warta PPKS Volume 15.3.26-39

Ditjenbun. 2012. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit 2011 – 2012.* Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian

Hasan, N. 2009. *Strategi Penguatan Kelompok Tani dalam Pengembangan Usaha (Kasus Kelompok Tani Karya Agung Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi).* Bogor : Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

Koentjaraningrat, 1997. *Kebudayaan, Mentalitas dalam Pembangunan.* Jakarta : Gramedia.

Mawardi, S. 2012. *Pengalaman Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dalam Pemberdayaan Petani.* Presentasi. Jember : Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

Mantra, I. B, 2004. Filsafat dan Metode Penelitian Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Syahyuti, 2006. 30 konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Bina Rena Pariwara. Jakarta

Wigena, dkk. 2009. *Desain Model Pengelolaan Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus Kebun Kelapa Sawit Plasma PTP Nusantara V Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provunsi Riau).* Jakarta : Jurnal Agro Ekonomi Vol. 27 No. 01 - 2009.

Wahyuni,2009. Intergrasi Kelembagaan di Tingkat Petani: Optimalisasi Kinerja Pembangunan Pertanian. SInar Tani, Jakarta

Zuhri, I. 2008. Pengaruh Alokasi Tenaga Kerja Keluarga Terhadap Pendapatan Petani Plasma PIR Kelapa Sawit Pasca Konversi di Sumatera Selatan. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran Bandung

IOPRI Laboratory for Fertilizer Analysis

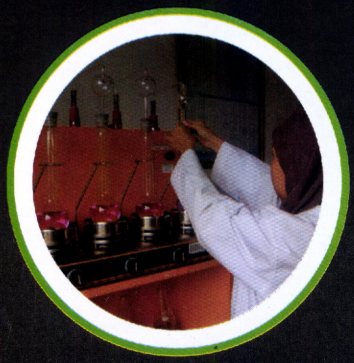

Oil palm yield is influenced by a number of interacting factors. Fertilizers is an integral and essential component in oil palm cultivation, which contributes 20 – 25 percent of production cost of fresh fruit bunch (FFB) production. Fertilizer and its application cost about 60% of the plantation maintenance. However, excessive application of fertilizer has negative impact for oil palm and environment. Proper fertilizer application, in term of fertilizer kind, dosage, method, and time are very important in order oil plam grow and develop effectively.

IOPRI Laboratory for fertilizer analysis help you to conduct the analysis of chemical and organic fertilizer in accordance with standard methods such as Standar Nasional Indonesia (SNI). Test parameters analyzed include P_2O_5, K_2O, CaO, MgO, Moisture, Mesh, Micro element, Heavy metal and many more.

Indonesian Oil Palm Research Institute (IOPRI)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)
Jl. Brigjend. Katamso No. 51, Medan 20158, Indonesia,
Telp. 061-7862477, Fax. 061-7862488
e-mail : admin@iopri.org, http://www.iopri.org